

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa persoalan tentang peredaran dan kartel narkoba dan obat bius di ASEAN pada periode 2008-2014 telah menjadi problematika serius bagi negara-negara Asia Tenggara ini. Berbagai langkah penegakan hukum atau *law enforcement* dan dukungan regulasi kebijakan secara regional dan internasional ternyata tidak sepenuhnya efektifnya. Dengan kata lain berbagai upaya-upaya ASEAN dalam menangani masalah ini masih belum berhasil yang ditandai dengan masih tingginya kasus penyelundupan narkoba pada beberapa negara ASEAN< diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Hambatan ASEAN dalam menangani kartel narkoba disebabkan faktor teknis yaitu modus operandi peredaran narkoba dan obat bius di ASEAN yang rapi dan berbeda-beda sehingga sulit untuk dideteksi. Selain itu, jika dilihat dari kondisi geografis, maka negara-negara ASEAN sendiri memiliki bentang wilayah yang luas yang terdiri dari hutan, perairan dan ciri geografis yang berbeda-beda dan ini akan menyebabkan sulitnya penanganan operandi peredaran narkoba dan obat bius di ASEAN. Sebagian besar dari para pelaku/penyelundup narkoba, termasuk adanya goldn triangle yang menyebabkan semakin kompleknya masalah kartel narkoba di ASEAN.

Kemudian terdapat juga hambatan ASEAN dalam aspek keamanan ini berkaitan dengan kronisitas persoalan, dimana perkembangan narkoba di negara-negara dunia telah menjadi persoalan baru yang terangkum dalam *extra ordinary*

*crime*. Masalah ini menjadi persoalan hampir seluruh negara dunia, dimana kartel narkoba berhasil menggunakan perangkat teknologi informasi, penyelundupan dengan memanfaatkan orang-orang yang tidak dikenal hingga karakteristik geografis negara-negara ASEAN yang memang didominasi oleh negara-negara kepulauan, bukan hanya negara yang dibatasi oleh daratan (*land locked*).

Persoalan peredaran narkoba memang telah menjadi persoalan penting di wilayah Asia Tenggara, namun derajat/intensitas persoalan ini ternyata tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Pada periode 2008-2014 tercatat hanya beberapa negara ASEAN saja yang menghadapi masalah peredaran narkoba secara kronik, diantaranya Indonesia dan Thailand, sedangkan lainnya yang terjadi pada intensitas yang kurang membahayakan, seperti halnya yang terjadi di Vietnam, Laos, Kamboja dan beberapa negara lainnya sehingga ini mempengaruhi pembuatan kebijakan ASEAN dalam menangani masalah narkoba, khususnya pada even-even KTT.

Persoalan narkoba di wilayah ASEAN ternyata juga tidak direspon secara sama sebagai persoalan regional. Beberapa negara menganggap masalah human security yang terjadi justru pada terorisme, klandestin/penyerangan sporadis, human trafficking dan lain-lainnya. Faktor politik inilah yang mampu menjadi hambatan bagi ASEAN dalam menangani peredaran narkoba. Inilah yang menjadi benturan antara kepentingan nasional negara-negara ASEAN. Masing-masing negara Asia Tenggara ini ternyata memiliki prioritas agenda keamanan yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan sulitnya terbentuknya sikap kesepahaman, sehingga upaya dalam menangani kartel narkoba menjadi kurang

dapat berjalan secara efektif. Inilah yang menjadi hambatan bagi ASEAN dalam menangani kartel narkoba dalam aspek politik.

Jika dikaitkan dengan teori efektifitas rezim maka upaya ASEAN dalam menangani kartel narkoba tidak lepas dari berbagai hambatan, sehingga organisasi ini tidak sepenuhnya mampu dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya. Faktor keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan menjadi bukti bahwa sejak didirikan pada tahun 187 hingga periode 2008-2014 ASEAN belum dapat membangun integrasi keamanan, misalnya memiliki otoritas, sumber daya manusia, perangkat hukum secara tunggal dan terintegrasi.

Kemudian jika dilihat dari aspek politik yaitu kedaulatan (*sovereignty*) maka negara-negara ASEAN masing-masing memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga persoalan kartel narkoba hanya menjadi prioritas beberapa negara saja, misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand dan beberapa negara lainnya, sedangkan bagi negara lain, diantaranya Laos, Myanmar, Brunei Darusallam dan negara lain memandang persoalan kartel narkoba bukan sebagai prioritas. Inilah yang menyebabkan sulitnya ASEAN dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya untuk bekerja-sama dan bersikap pro-aktif dalam menangani kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian maka dapat dibuktikan tentang hambatan-hambatan ASEAN dalam upaya-upaya memberantas kartel narkotika di Asia Tenggara pada periode 2008-2014.